Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Sumorame

[1]Uswatun Khasanah, [2]Isnaini Rodiyah
[1,2]Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Korespondensi : ushwawa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumorame sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa, namun masih terdapat kendala adaptasi sistem oleh aparat desa dan kendala teknis yang memperlambat proses administrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur yang lebih baik, dan kebijakan yang adaptif agar implementasi Siskeudes dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci : *Aplikasi, Sistem Keuangan Desa, Desa Sumorame.*

Abstract

This study discusses the implementation of the Village Financial System Application (Siskeudes) in Sumorame Village as an effort to increase transparency and accountability in village financial management. Using a descriptive qualitative research method, this study analyzes various challenges faced, such as limited human resources, inadequate technological infrastructure, and technical constraints in using the application. The results of the study indicate that Siskeudes helps improve the efficiency of village financial management, but there are still obstacles in the adaptation of the system by village officials and technical problems that slow down the administration process. Therefore, it is necessary to increase human resource capacity, better infrastructure support, and adaptive policies so that the implementation of Siskeudes can run more optimally.

Keyword: *Application, Village Financial System, Sumorame Village.*

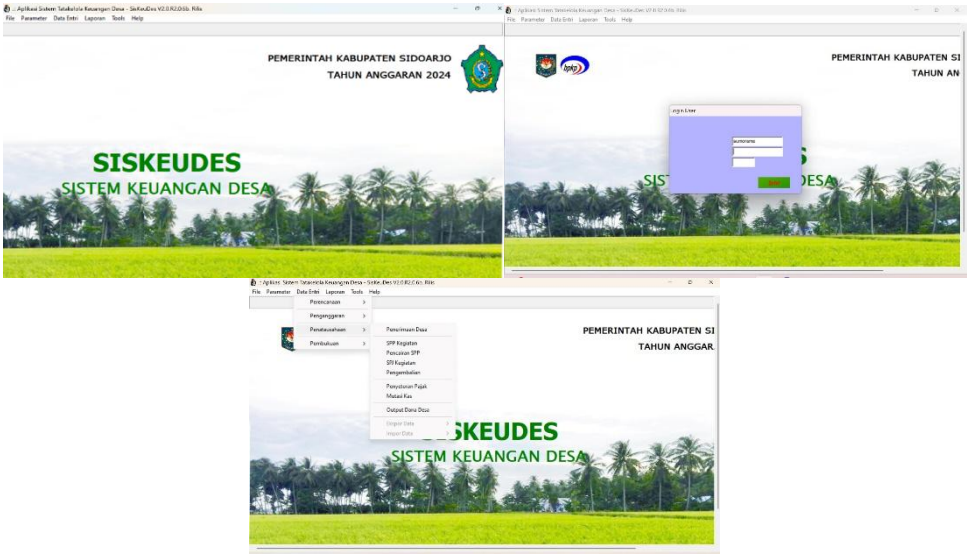
1. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa adalah sebuah organisasi yang memiliki peran penting dalam membantu pemerintah pusat dan daerah melaksanakan fungsi pemerintahan, mencakup pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, serta pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa "negara memberikan pengakuan khusus (subsidiaritas) terhadap desa sebagai wilayah otonom, dengan memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur kepentingannya sendiri." [1] Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kemandirian desa menjadi aspek krusial yang diharapkan dapat mendorong kemampuan desa untuk mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan warganya secara mandiri. Dalam konteks ini, kemandirian desa tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, tetapi juga menjadi jalan menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat.

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa.[2] Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien menjadi landasan utama agar dana desa dapat memanfaatkan secara optimal dalam mendukung

pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa meliputi proses pengumpulan dan pertanggungjawaban dana. konteks ini, desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap alokasi dana yang diterima, baik dari pemerintah pusat maupun sumber lain, dikelola dengan tepat guna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3] Meski demikian, pada kenyataannya, banyak desa masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengelolaan keuangan. Tantangan ini mencakup aspek pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan yang sering kali dilakukan secara manual dan kurang sistematis, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses pelaporan dan pengelolaan. Pengelolaan keuangan desa masih menghadapi masalah seperti pencatatan manual, pelaporan yang kurang akurat, keterbatasan SDM di bidang keuangan, dan akses teknologi yang rendah. Kondisi ini membuat proses pencatatan dan pelaporan rentan kesalahan dan menghambat alokasi dana secara efektif.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menginisiasi peluncuran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) seperti pada gambar nomer 1. Aplikasi Siskeudes, yang sebelumnya dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDA DESA), dikembangkan melalui kerja sama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) [4]. Aplikasi ini didesain secara khusus untuk mendukung pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih terstruktur dan terintegrasi, meliputi berbagai tahap mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan keuangan secara digital. Diharapkan dengan adanya Siskeudes, desa mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, meminimalkan kesalahan yang sering terjadi dalam proses pencatatan manual, serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas, baik di internal desa maupun dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat.



Gambar 1 Menu pada Aplikasi Siskeudes Desa Sumorame
Sumber : Bendahara Desa Tahun 2024

Implementasi Siskeudes adalah wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan tata kelola keuangan desa yang lebih modern dan sesuai tuntutan era digital. Pengelolaan yang efisien, akurat, dan cepat sangat diperlukan agar penggunaan dana desa efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Pengelolaan keuangan desa juga berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik [5]. Desa diharuskan mengelola keuangan desa secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, efisien, dan melibatkan partisipasi

masyarakat. Transparansi mengacu pada pengelolaan yang dilakukan secara terbuka, akuntabilitas berarti setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum, efektivitas menunjukkan pengelolaan yang tepat dan benar, sementara partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut [6]. Berbagai peraturan dan undang-undang telah diterbitkan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, di antaranya Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan Desa harus mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa keuangan Desa mencakup semua hak dan kewajiban yang dinilai dalam bentuk uang, serta segala hal yang berupa uang dan barang yang memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Desa [7]. Undang-undang ini menetapkan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengelola keuangan secara mandiri dari berbagai sumber pendapatan, termasuk Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalamnya juga diatur bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

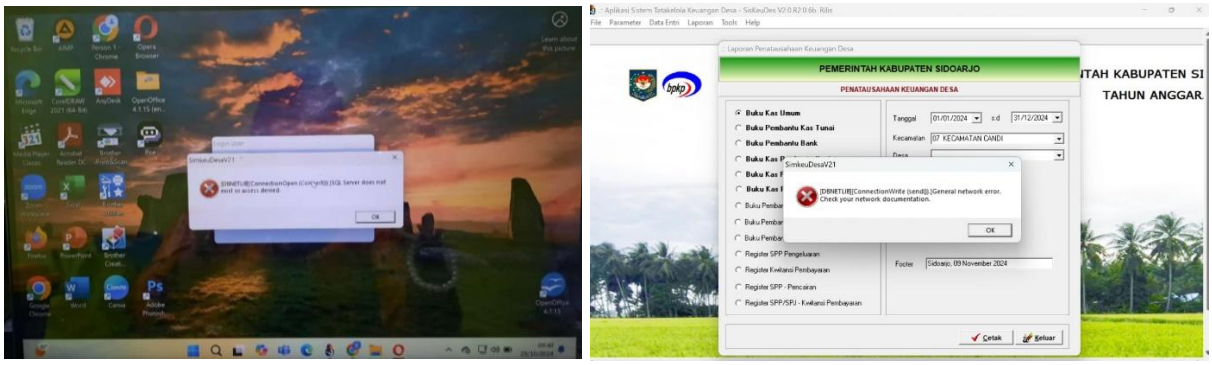
Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Implementasi Siskeudes di Desa Sumorame didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang semakin kompleks seiring dengan peningkatan alokasi dana desa. Melalui penggunaan Siskeudes, diharapkan pemerintah Desa Sumorame mampu mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, meningkatkan efisiensi, dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalkan, serta pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan lebih optimal. Sebelum adanya penerapan Siskeudes, penyusunan laporan keuangan di Desa melalui proses manual yakni menggunakan Ms, Excel. Proses manual yang dilakukan memerlukan waktu rata-rata 5 hari untuk menyusun laporan keuangan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan dalam pencatatan dan pengelolaan data keuangan secara efisien. Ketidakakuratan data dan kemungkinan terjadi kesalahan input juga lebih tinggi, yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dalam pengelolaan anggaran. Situasi ini berpotensi menghambat transparansi, sehingga masyarakat desa tidak mudah mendapatkan informasi terkait anggaran. Setelah penerapan Siskeudes, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan berkurang signifikan menjadi rata-rata 5 jam hingga saat ini.

Aplikasi Siskeudes memberikan banyak kemudahan dalam pengelolaan anggaran dan realisasi dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Aplikasi Siskeudes mempermudah pengelolaan keuangan desa melalui otomatisasi, sehingga lebih transparan, akuntabel, dan efisien dibandingkan sistem manual yang rentan terlambat dan rawan kesalahan. Dengan Siskeudes, pengelolaan keuangan menjadi lebih akurat, terkontrol, dan mendukung monitoring serta evaluasi yang efektif untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Sumorame diidentifikasi terdapat beberapa masalah dalam penginputan data. Pertama, sebagimana informasi dari bendahara Desa Sumorame dalam penggunaan aplikasi Siskeudes, jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran, perubahan tidak dapat dilakukan secara langsung. Perubahan data memerlukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan Dinas PMD untuk membuka penguncian, guna memastikan kontrol dan kesesuaian dengan aturan. Kelengkapan data sangat penting karena sistem otomatis memproses dan menyinkronkan informasi, karena jika ada data yang tidak diinput, proses seperti penyusunan APBDes atau laporan keuangan tidak dapat dilanjutkan. jika data pendapatan desa belum diinput, sistem tidak bisa menghitung total anggaran, sehingga tahap anggaran belanja terganggu. Oleh karena itu, memastikan data terisi dengan benar sejak awal sangat penting untuk kelancaran pengelolaan keuangan desa. kondisi tersebut terjadi pada JUNI 2024, sebagimana pernyataan salah satu aparatur desa Sumorame bahwa; pada waktu rencana penetapan anggaran perbaikan saluran drainase di RT002/RW005 terinput senilai Rp. 74.028.056. melalui aplikasi

siskeudes. Namun Ketika pencairan ditemukan kekurangan dana untuk upah tenaga kerja karena kebutuhan tambahan yang tidak terantisipasi (kenaikan harga upah tukang dan kuli bangunan), untuk mengatasinya, pemerintah desa mengalihkan sebagian anggaran material ke upah tenaga kerja itupun harus mengunggah lagi melalui system Siskeudes. Proses ini dilakukan pihak desa berkoordinasi dengan kecamatan untuk membuka akses kunci dan mengubahnya, namun Proses inilah yang menjadiakn laporan keuangan siskuedes menjadi terlambat dari yang sebagaimana ditentukan.

kedua, permasalahan lain juga ditemui pada pelaksanaan siskeudes adalah sistem ini dioperasionalkan secara sentral, jadi tidak menutup kemungkinan aplikasi tiba-tiba off secara mendadak, dan data sedang proses input akan mengulang. Ketiga yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, karena tidak semua perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menggunakan aplikasi siskeudes secara optimal, ke empat tantangan yang dihadapi mengenai keterbatasan infrastruktur dan teknologi seperti koneksi internet yang tidak stabil karena sering terjadi eror pada aplikasi siskeudes , bendahara pun kesulitan dalam menginput data. Waktu yang dibutuhkan pun menjadi lebih lama, sehingga kerugian waktu dan tenaga tak dapat dihindari. Di tengah proses administrasi yang harusnya berjalan lancar hambatan ini menimbulkan keresahan dan mengganggu efisiensi kerja, seolah membuat Langkah desa untuk mencapai kemajuan sedikit tertahan dan perangkat komputer yang tidak memadai karena komputer atau laptop yang sudah usang atau tidak kompatibel dengan aplikasi yang digunakan.



Gambar 2 Permasalahan Aplikasi Siskeudes
Sumber : Bendahara Desa Tahun 2024

Gambar 2 menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menghadapi kendala teknis, seperti gangguan pada komputer atau laptop yang digunakan, serta koneksi internet yang tidak stabil. Siskeudes membutuhkan koneksi internet untuk sinkronisasi data, sehingga sinyal yang lemah dapat membuat aplikasi berjalan lambat atau tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, aplikasi Siskeudes bisa mengalami error jika terlalu lama dibiarkan dalam keadaan tidak aktif.

Teori yang relevan dalam memahami proses implementasi ini adalah Teori Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang dinamis, dalam arti perubahan pada salah satu faktor akan mengakibatkan perubahan pada faktor lain. Tidak ada faktor yang benar-benar bebas dari faktor yang lain. Hal ini mereka sebut sebagai rippled effect[8]. Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation) [9]. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, Siskeudes dapat memberikan manfaat besar bagi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini adalah pertama, Kiki Rizki Ramadhan dan Evi Priyanti dengan judul Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Jurnal ini membahas pelaksanaan aplikasi SISKEUDES yang diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Telukjambe, menggunakan model implementasi Edward III dan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan penerapan Siskeudes di Desa Telukjambe kurang efektif meski sesuai aturan. Komunikasi baik, tetapi terbatasnya sumber daya dan kinerja aparatur menghambat implementasi. Operator Siskeudes dirangkap Sekretaris Desa, menunjukkan minimnya sumber daya kompeten. Disposisi dan struktur birokrasi juga kurang mendukung, sehingga perlu evaluasi dari pemerintah desa. Jurnal ini berhasil mengidentifikasi masalah dalam implementasi SISKEUDES dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi. Penelitian ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di tingkat desa, yang merupakan langkah penting dalam reformasi pemerintahan desa di Indonesia [7].

Kedua, Zelza Rachmana Nur Alifah, Maulana Rifai dan Lina Aryani dengan judul Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap PengelolaanKeuangan di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang Studi Kasus: Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat. Penelitian menggunkan metode pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Siskeudes di Desa Mekarmulya dimulai pada tahun 2017 dan mulai aktif digunakan pada 2019. Implementasinya dinilai cukup baik dalam pemanfaatan dan transparansi keuangan desa, meskipun menghadapi kendala seperti kurangnya sarana, laptop, dan akses internet yang lambat. Aplikasi ini menerima data perencanaan, penganggaran, administrasi, serta pembukuan, sementara outputnya berupa laporan tahunan program desa. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kekurangan, pelaksanaan Siskeudes di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang dianggap memadai dan masih perlu penyempurnaan [10],

Ketiga Thareq Kemal dengan judul Implementasi Inovasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena implementasi aplikasi secara mendalam. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi juga memberikan perspektif yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes 2.0 di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh permasalahan sumber daya yang terbatas dan kinerja aparatur yang belum optimal, akibat minimnya pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komputer. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di desa Sumorame [11].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (1998) Pendekatan kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman dan eksplorasi fenomena sosial serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan manusia [12]. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan peneliti melakukan kajian mendalam terkait penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terutama di Desa Sumorame. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada implementasi aplikasi keuangan desa (SISKUEDES) di Desa Sumorame. Teknik penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*,

informan yang dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusi mereka terhadap focus penelitian. Informan yang terlibat langsung yakni Bendahara desa dan Sekretaris desa data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama tanpa melalui pihak ketiga, misalnya melalui wawancara dan observasi langsung. Sementara itu, data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber lain, seperti kajian literatur, buku, artikel ilmiah, dokumen, arsip, catatan, atau berita dari media yang relevan dengan informasi tentang Siskeudes. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi[13]. Teknis analisis data Penelitian menurut Miles dan Huberman(1984), terdapat empat tahapan dalam analisis penelitian lapangan yaitu pengumpulan data.reduksi data.penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dan mencocokkan hasilnya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jika data dirasa kurang, wawancara ulang dilakukan. Data berupa transkrip wawancara dari informan kunci dan FGD. Pada tahap reduksi data, data yang tidak relevan disaring, sementara data penting dirangkum dan dikelompokkan berdasarkan tema, pola, atau kategori tertentu. Hal ini mempermudah analisis lebih lanjut. Data yang telah dirangkum kemudian disusun dalam bentuk kutipan berdasarkan tema atau pola yang sama untuk menunjukkan kealamiahan data dan mendukung uji kredibilitas. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal bersifat tentatif, namun semakin kuat seiring bertambahnya data. Kesimpulan memberikan gambaran logis dan menyeluruh untuk menjawab pertanyaan penelitian[14].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mazmanian dan Sabatier (dikutip Wibowo, dkk. 1994: 25) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel[15] yaitu:

A. Karakteristik Masalah

Indikator karakteristik masalah menurut Mazmanian dan Sabatier mencakup tiga aspek utama yang memengaruhi implementasi kebijakan. Pertama, kejelasan tujuan dan prioritas kebijakan, di mana suatu kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan tidak ambigu agar dapat diterjemahkan dengan baik pada tingkat implementasi. Kedua, pengetahuan teknis yang relevan, yakni sejauh mana pemahaman dan informasi yang tersedia dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Ketiga, permasalahan eksternal, seperti dinamika politik, sosial, dan ekonomi, yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga indikator ini penting untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dalam proses implementasi dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasinya, sehingga kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan[16].

Implementasi Siskeudes di Desa Sumorame, yang dimulai pada tahun 2020, menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jaringan internet dan kurangnya pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan sistem. Faktor SDM, termasuk latar belakang pendidikan yang tidak memadai dan rendahnya motivasi belajar, turut memperumit proses adaptasi. Meski demikian, aplikasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Upaya telah dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman, tetapi dukungan infrastruktur dan penguatan budaya kerja masih diperlukan agar Siskeudes dapat diterapkan secara optimal.

Dilihat dari indikator karakteristik masalah terkait kejelasan masalah dalam implementasi Siskeudes di Desa Sumorame mencakup beberapa aspek utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Pertama, kejelasan tujuan kebijakan, di mana penggunaan Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, tetapi pemahaman terhadap tujuan ini belum merata di antara perangkat desa. Kedua, ketersediaan pengetahuan teknis menjadi kendala, karena banyak perangkat desa yang kurang

memahami cara mengoperasikan sistem akibat minimnya pelatihan dan latar belakang pendidikan yang tidak mendukung. Ketiga, faktor eksternal seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet juga menjadi penghalang signifikan dalam pelaksanaan sistem ini.

Hal tersebut diperkuat oleh informan Bendahara Desa Sumorame yang menyatakan *"Pada tingkat implementasi, pemahaman tentang tujuan ini belum sepenuhnya merata di antara perangkat desa. Beberapa pihak menganggap Siskeudes hanya sebagai alat administratif, tanpa menyadari manfaat strategisnya untuk tata kelola yang lebih baik"*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa tentang tujuan implementasi Siskeudes masih beragam. Sebagian perangkat desa hanya memandang Siskeudes sebagai alat administratif untuk mencatat dan melaporkan keuangan desa, tanpa menyadari perannya yang lebih luas dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan. Hal ini mengindikasikan kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai manfaat strategis Siskeudes, sehingga pemanfaatan sistem ini belum maksimal. Kurangnya pemahaman ini dapat berdampak pada rendahnya motivasi perangkat desa untuk menguasai sistem secara mendalam dan mengintegrasikannya dengan pengelolaan keuangan desa secara holistik. Interpretasi ini menunjukkan pentingnya edukasi berkelanjutan agar perangkat desa dapat memahami dan memanfaatkan Siskeudes sesuai dengan tujuannya.

Karakteristik masalah terkait kompleksitas masalah di desa Sumorame menurut Sekretaris desa menyatakan "*Tingkat kompleksitas masalah penggunaan dan pelaporan Siskueudes di Desa Sumorame dapat dianalisis dari beberapa aspek antara lain Faktor Internal. 1 Kapasitas SDM, Kemampuan dan pengetahuan perangkat desa dalam mengoperasikan Siskueudes. 2 Ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet".*

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kompleksitas masalah dalam penggunaan dan pelaporan Siskeudes di Desa Sumorame dipengaruhi oleh beberapa faktor internal. Pertama, kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama, di mana perangkat desa menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan Siskeudes akibat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknis. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa. Kedua, ketersediaan infrastruktur teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet juga menjadi masalah signifikan. Keterbatasan ini menghambat kelancaran proses pengelolaan dan pelaporan data keuangan desa. Interpretasi ini menunjukkan bahwa perbaikan di aspek SDM dan infrastruktur sangat penting untuk mengatasi kompleksitas dalam implementasi Siskeudes.

Implementasi Siskeudes di Desa Sumorame menghadapi sejumlah tantangan yang mendalam dan berakar pada karakteristik masalah kebijakan yang tercermin dalam tiga aspek utama menurut Mazmanian dan Sabatier. Dari sisi kejelasan tujuan, meskipun Siskeudes dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, pemahaman perangkat desa terhadap tujuan strategis ini belum merata. Banyak perangkat desa yang masih memandang Siskeudes sekadar sebagai alat administratif untuk mencatat dan melaporkan keuangan, tanpa sepenuhnya menyadari potensi sistem ini dalam meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan desa. Kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai tujuan jangka panjang Siskeudes ini menyebabkan pemanfaatan sistem yang belum optimal dan tidak mencerminkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyuluhan secara lebih intensif dan terstruktur agar seluruh perangkat desa dapat memahami manfaat dan tujuan strategis dari aplikasi ini.

Dari segi pengetahuan teknis, masalah utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang tidak memadai serta kurangnya pelatihan yang cukup untuk mengoperasikan sistem ini dengan efektif. Hal ini membuat sebagian perangkat desa kesulitan dalam menggunakan Siskeudes sesuai dengan fungsinya. Selain itu, faktor eksternal, terutama terbatasnya infrastruktur teknologi seperti perangkat keras dan jaringan internet yang stabil, semakin memperburuk situasi. Kendala infrastruktur ini menghambat kelancaran operasional Siskeudes, sehingga mempengaruhi kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Untuk mengatasi kendala ini, langkah

strategis yang diperlukan mencakup peningkatan kualitas pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi perangkat desa, serta perbaikan dan penguatan infrastruktur teknologi, terutama dalam hal konektivitas internet. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Siskeudes dapat diterapkan secara lebih optimal dan mencapai tujuannya dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Kondisi implementasi siskeudes sejalan dengan teori implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier yang menjelaskan bahwa Hasil implementasi Siskeudes di Desa Sumorame sesuai dengan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang mengidentifikasi tiga aspek utama. Pertama, kejelasan tujuan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh perangkat desa, yang mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan Siskeudes. Hal ini mencerminkan kurangnya sosialisasi yang efektif, yang menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Kedua, pengetahuan teknis perangkat desa terbatas, sehingga mereka kesulitan mengoperasikan sistem akibat latar belakang pendidikan yang kurang memadai dan minimnya pelatihan. Ketiga, permasalahan eksternal, terutama keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang tidak stabil, turut memperburuk implementasi Siskeudes. Berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, ketiga faktor ini mempengaruhi keberhasilan kebijakan, sehingga perbaikan dalam pelatihan, pemahaman tujuan, dan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan implementasi Siskeudes. Hal tersebut sejalan dengan penelitian **Penelitian oleh Ningsih et al. (2019)** menyoroti bahwa faktor eksternal seperti infrastruktur teknologi yang tidak memadai, terutama masalah jaringan internet, dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan berbasis teknologi di desa. Temuan ini juga tercermin di Desa Sumorame, di mana terbatasnya akses internet menghambat pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Oleh karena itu, berbagai penelitian terdahulu menegaskan pentingnya memperbaiki kapasitas SDM, meningkatkan pemahaman tujuan kebijakan, dan memperkuat infrastruktur untuk memastikan implementasi kebijakan yang sukses, seperti yang diharapkan dalam implementasi **Siskeudes** di Desa Sumorame[17].

B. Karakteristik Kebijakan

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier, Karakteristik Kebijakan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Indikator ini mengacu pada sejauh mana kebijakan yang diterapkan memiliki kejelasan tujuan, konsistensi logis, dan dukungan teknis yang memadai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks implementasi Siskeudes di Desa Sumorame, karakteristik kebijakan dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Kejelasan tujuan, misalnya, terlihat dalam arahan kebijakan yang berfokus pada peningkatan tata kelola keuangan desa. Namun, konsistensi logis sering kali terkendala oleh ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan, seperti keterbatasan jaringan internet dan kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Selain itu, dukungan teknis seperti pelatihan operasional Siskeudes menjadi krusial untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam mengoperasikan sistem. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada sejauh mana kebijakan dirancang secara spesifik dan mampu menjawab tantangan lokal yang ada.

Implementasi Siskeudes di Desa Sumorame menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan temuan di lapangan, salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama jaringan internet yang belum memadai. Hal ini menghambat kelancaran operasional sistem, terutama dalam penginputan dan pelaporan data keuangan secara real-time. Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi isu krusial. Banyak perangkat desa yang masih kurang memahami pengelolaan Siskeudes akibat latar belakang pendidikan yang tidak mendukung, minimnya pengalaman teknologi, serta kurangnya pelatihan yang berkesinambungan. Motivasi perangkat desa juga menjadi perhatian, karena beban kerja tambahan dari implementasi Siskeudes sering kali tidak diimbangi dengan insentif yang

memadai. Meski demikian, terdapat upaya dari pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini, seperti melakukan pelatihan teknis dan menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan dukungan teknis dan infrastruktur. Secara keseluruhan, implementasi Siskeudes di Desa Sumorame menunjukkan pentingnya penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur pendukung.

Dilihat dari indikator karakteristik kebijakan terkait keberlanjutan dan keterpaduan kebijakan dalam implementasi Siskeudes Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan Siskeudes di Desa Sumorame memiliki potensi keberlanjutan karena dukungan regulasi yang kuat. Namun, tantangan seperti jaringan internet yang tidak stabil dan kurangnya pelatihan bagi perangkat desa menghambat pelaksanaannya. Dari sisi keterpaduan, meskipun kebijakan ini dirancang untuk terintegrasi dengan tata kelola desa, implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan lokal. Informan menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan, dukungan teknis, serta monitoring dari pemerintah kabupaten agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dalam jangka panjang.

Hal tersebut diperkuat oleh informan Sekretaris Desa Sumorame yang menyatakan*" Siskeudes yang diterapkan di Desa Sumorame bersifat berkelanjutan dan jangka panjang jika dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Dengan Siskeudes, pengelolaan anggaran desa menjadi lebih terstruktur, sehingga mendukung perencanaan pembangunan yang berkesinambungan."*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes di Desa Sumorame memiliki potensi untuk berlangsung secara berkelanjutan dan jangka panjang. Hal ini dikarenakan sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan menggunakan Siskeudes, pengelolaan anggaran desa menjadi lebih terstruktur, yang pada gilirannya mendukung perencanaan pembangunan yang berkesinambungan. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mempermudah pemantauan dan pengelolaan keuangan desa, serta memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes di Desa Sumorame memiliki potensi untuk berkelanjutan dan mendukung pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan efisien. Dukungan regulasi yang kuat menjadi salah satu faktor utama keberlanjutan kebijakan ini. Namun, sejumlah tantangan perlu diatasi, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet yang belum memadai, serta kurangnya pelatihan dan pemahaman perangkat desa terkait pengoperasian sistem. Selain itu, faktor motivasi perangkat desa juga menjadi perhatian, karena beban kerja tambahan tidak selalu diimbangi dengan insentif yang memadai. Meski demikian, terdapat upaya pemerintah desa dan kabupaten untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan penguatan infrastruktur pendukung. Agar kebijakan ini lebih efektif, diperlukan penyesuaian dengan kebutuhan lokal, monitoring yang berkelanjutan, serta penguatan dukungan teknis sehingga tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat tercapai secara optimal.

Hal tersebut sejalan dengan indikator karakteristik kebijakan Mazmanian dan Sabatier, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki kejelasan tujuan yang baik, yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Namun, konsistensi logis kebijakan ini masih terkendala oleh tantangan di lapangan, seperti keterbatasan jaringan internet dan kurangnya pemahaman teknis perangkat desa. Dukungan teknis yang mencakup pelatihan berkelanjutan dan infrastruktur pendukung juga belum optimal, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi lokal. Penelitian terdahulu oleh Suharto (2020) juga menyoroti bahwa pelaksanaan sistem berbasis teknologi di tingkat desa membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia. Dalam konteks ini, Siskeudes di Desa Sumorame memperkuat temuan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan berbasis teknologi sangat bergantung pada keselarasan antara desain kebijakan dengan kondisi lokal serta dukungan teknis yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan

penyesuaian kebijakan, penguatan kapasitas perangkat desa, dan monitoring yang intensif untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai secara berkelanjutan [18].

C. Variabel Lingkungan

Menurut Mazmanian dan Sabatier, indikator variabel lingkungan mengacu pada elemen-elemen eksternal atau kondisi di lingkungan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Variabel ini mencakup faktor-faktor seperti stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta dukungan dari kelompok masyarakat atau institusi yang relevan. Dalam konteks teori implementasi kebijakan, Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Dengan demikian, memahami indikator variabel lingkungan menjadi krusial untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik [10].

Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumorame, jika dilihat dari perspektif variabel lingkungan menurut Mazmanian dan Sabatier, menunjukkan bahwa kondisi eksternal memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaannya. Secara sosial, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa cukup mendukung, meskipun masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan di kalangan sebagian perangkat desa. Dari sisi ekonomi, stabilitas keuangan desa dan alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan Siskeudes memberikan dukungan positif. Namun, kendala muncul pada infrastruktur teknologi, seperti koneksi internet yang tidak merata, yang memengaruhi kelancaran operasional sistem. Secara politik, dukungan pemerintah daerah sangat signifikan dalam bentuk supervisi dan bimbingan teknis, meskipun terkadang kebijakan yang kurang sinkron di tingkat atas menghambat pelaksanaan di lapangan. Faktor lingkungan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Siskeudes tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada adaptasi kebijakan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Desa Sumorame.

Indikator variabel lingkungan terkait implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumorame mencakup beberapa aspek penting yang memengaruhi keberhasilannya. Dari aspek sosial, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi indikator kunci, terutama dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Namun, rendahnya literasi keuangan di beberapa kalangan masyarakat dan perangkat desa menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui edukasi dan pelatihan. Dari aspek ekonomi, stabilitas anggaran desa serta alokasi dana untuk pelatihan dan pengadaan perangkat teknologi menjadi faktor pendukung implementasi yang efektif. Dalam aspek teknologi, ketersediaan infrastruktur seperti komputer dan akses internet memengaruhi kelancaran operasional Siskeudes. Sementara itu, dari aspek politik, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, supervisi, dan bimbingan teknis sangat membantu proses implementasi, meskipun koordinasi yang kurang optimal antar tingkatan pemerintahan dapat menjadi kendala. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Siskeudes di Desa Sumorame sangat bergantung pada sejauh mana variabel lingkungan ini dapat dioptimalkan untuk mendukung tujuan sistem.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan Bendahara Desa yang menyatakan *"Implementasi Siskeudes adalah perintah undang-undang jadi sangat dipatuhi dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku."*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumorame dilihat sebagai kewajiban yang mendasar karena merupakan mandat dari undang-undang. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku, sekaligus menunjukkan adanya kesadaran hukum yang kuat. Pernyataan tersebut juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan Siskeudes tidak hanya dianggap sebagai formalitas, tetapi dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Komitmen untuk

melaksanakan sistem ini sesuai aturan mencerminkan upaya serius pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, pemahaman bahwa Siskeudes adalah instrumen penting yang diatur oleh hukum menunjukkan bahwa pemerintah desa menyadari perannya sebagai pelaksana kebijakan publik yang harus memastikan setiap langkah operasional selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik, efektif, dan transparan.

Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumorame dipengaruhi oleh berbagai indikator variabel lingkungan sebagaimana dijelaskan oleh Mazmanian dan Sabatier. Keberhasilan pelaksanaan Siskeudes sangat terkait dengan kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang ada di lingkungan tersebut. Dari aspek sosial, meskipun masyarakat mendukung transparansi, rendahnya literasi keuangan di kalangan perangkat desa menjadi tantangan yang harus diatasi. Dari sisi ekonomi, alokasi anggaran yang memadai mendukung pelatihan dan pengelolaan sistem, namun kendala infrastruktur teknologi, seperti konektivitas internet yang terbatas, masih memengaruhi kelancaran implementasi. Dukungan politik dari pemerintah daerah, meskipun signifikan, membutuhkan koordinasi lebih baik antar tingkatan pemerintahan untuk mengoptimalkan pelaksanaan. Pernyataan informan yang menegaskan bahwa Siskeudes adalah mandat undang-undang menunjukkan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi dan kesadaran hukum yang kuat dalam menjalankan sistem ini. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Siskeudes di Desa Sumorame sangat bergantung pada upaya penguatan dan optimalisasi variabel lingkungan untuk mendukung tujuan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

Hasil temuan mengenai implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumorame sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan pentingnya variabel lingkungan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Menurut teori ini, faktor-faktor seperti stabilitas sosial, dukungan politik, kondisi ekonomi, dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas implementasi. Dalam konteks Siskeudes, keberhasilan implementasi terlihat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat terhadap transparansi, alokasi anggaran yang memadai, serta komitmen politik dari pemerintah daerah, meskipun tantangan berupa literasi keuangan yang rendah dan infrastruktur teknologi yang belum optimal tetap ada.

Penemuan ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti studi yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sering kali ditentukan oleh interaksi antara aktor pelaksana, sumber daya yang tersedia, dan kondisi lingkungan. Misalnya, penelitian terkait implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa menyoroti bahwa dukungan teknologi yang memadai, pelatihan yang berkelanjutan, dan koordinasi antar lembaga adalah elemen penting yang harus diperhatikan. Dengan demikian, hasil ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan seperti Siskeudes membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan sebagaimana digariskan oleh Mazmanian dan Sabatier, sekaligus mendorong upaya perbaikan di area yang masih menjadi kendala [4].

4. KESIMPULAN

Implementasi Siskeudes di Desa Sumorame telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebelum menggunakan Siskeudes, pencatatan keuangan dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Setelah penerapan aplikasi ini, efisiensi meningkat, dengan waktu penyusunan laporan yang lebih singkat dan proses pencatatan yang lebih akurat. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti

keterbatasan jaringan internet, kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengoperasikan sistem, serta kendala teknis dalam penginputan data.

Analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Siskeudes dipengaruhi oleh tiga faktor utama: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Kejelasan tujuan dan regulasi yang kuat mendukung keberlanjutan sistem ini, tetapi kendala teknis dan kurangnya pelatihan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan implementasi Siskeudes, diperlukan perbaikan pada aspek SDM melalui pelatihan intensif, peningkatan infrastruktur teknologi, serta kebijakan yang lebih fleksibel agar desa dapat menyesuaikan sistem dengan kebutuhan lokalnya.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumorame, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem ini. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa melalui program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aparat desa memiliki pemahaman yang memadai mengenai fungsi, tujuan, serta tata cara pengoperasian aplikasi Siskeudes. Dengan demikian, kendala teknis maupun kesalahan dalam penginputan data dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. W. Annisa, Y. E. Wulandari, G. G. Gumilar, and I. Aditya, "Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang," *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Audit.*, vol. 4, no. 1, pp. 241–248, 2023, doi: 10.56696/jaka.v4i1.8447.

[2]. D. Novitasari and G. A. Hilmiawan, "Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Guna Mewujudkan Good Village Governance (Studi di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul)," *J. Ekon.*, vol. 15, no. 01, pp. 93–108, 2024.

[3]. M. Fitrianti and V. F. Sari, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance," *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 206–218, 2024.

[4]. I. Elfirar and N. E. Putri, "Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Nagari Selayo," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 5, no. 1, p. 11, 2024, doi: 10.47134/villages.v5i1.90.

[5]. S. Helmi *et al.*, *Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Gampong Dalam Mewujudkan Percepatan Pelayanan Dan Pembangunan Melalui Sistem Informasi Gampong (SIGAP)*. CV. Green Publisher Indonesia, 2024.

[6]. M. Y. Hasliani and M. Yusuf, "Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa," *YUME J. Manag.*, vol. 4, no. 1, pp. 179–192, 2021, doi: 10.37531/yume.vxix.234.

[7]. K. R. Ramadhan and E. Priyanti, "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang," *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 6, no. 3, pp. 10483–10495, 2022, doi: 10.58258/jisip.v6i3.3472.

[8]. B. A. B. Ii, "To Estabilsh a Link That Allows the Goals of Public To Be Realized As Outcomes of Governmental Activity "," pp. 14–53, 2011.

[9]. A. GFallis, "Teori Kebijakan Implementasi," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.

[10]. Z. Rachma Nur Alifah *et al.*, "Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang Studi Kasus: Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 8, no. 15, pp. 612–622, 2022.

[11]. T. Kemal, "Implementasi Inovasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima," *J. Ilm. Multi Disiplin Indones.*, vol. 1, no. 9, pp. 1278–1285, 2022.

[12]. E. Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. 2020.

[13]. E. a. Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, no. Maret. 2022.

[14]. Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif," 2003.

[15]. N. Siregar, "Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)," vol. 15, no. 1, pp. 35–52, 2022.

[16]. Imronah, "Perspektif , Model dan Kriteria Pengukurannya IMPLEMENTASI KEBIJAKAN :," *J. Adminstrasi Publik*, pp. 65–85, 1984.

[17]. A. Ningsih, S. Nurhaliza, and E. Priyanti, "Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu," *J. Gov. Sci. J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–21, 2022, doi: 10.54144/govsci.v3i1.14.

[18]. H. T. Wibowo, D. Triyanto, and A. Sutojo, "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur," *J. Soc. Polit. Gov.*, vol. 2, no. 2, 2020, doi: 10.24076/jspg.v2i2.416.